

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan sistem pemerintahan desentralisasi dengan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah. Berdasarkan Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah meningkatkan peran serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Nurcholis H. , 2007). Konsekuensi dari tanggung jawab dan pembebanan tugas ke daerah yang semakin besar, Pemerintah daerah telah diserahkan sumber pendanaannya yang semakin meningkat. Evaluasi terhadap kebijakan - kebijakan di bidang pendanaan desentralisasi yang telah berjalan dan sedang berlangsung perlu dilakukan untuk dapat mengetahui perkembangan implementasi desentralisasi fiskal di daerah.

Pemerintah daerah memiliki keinginan untuk memberikan pelayanan yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat serta kebutuhan dan keinginan rakyat mengenai kinerja pemerintah daerah yang semakin besar dan kritis ini diwujudkan dengan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya sendiri

(desentralisasi fiskal). Desentralisasi fiskal adalah salah satu konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah sehubungan dengan konsep “*money follow functions*” (uang yang mengikuti fungsi), yang berarti transfer atau pendelegasian wewenang Pemerintah pusat yang disertai dengan alokasi dana yang dibutuhkan dalam melaksanakan kewenangan tersebut (Ritonga I. T., 2013).

Value for money merupakan konsep dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektifitas suatu kegiatan, program, dan organisasi (Mahmudi, 2015). Diterapkannya *value for money* dalam menjalankan aktivitas pelayanan publik pemerintah daerah harus selalu memperhatikan setiap rupiah yang diperoleh dan dipergunakan. *Value for money* memiliki peranan penting dalam terwujudnya kualitas layanan kepada masyarakat, sehingga dengan diterapkan *value for money* secara baik maka kualitas dan kuantitas pelayanan dapat terwujud seiring dengan perkembangan *value for money* itu sendiri dan begitupun sebaliknya apabila *value for money* tidak diterapkan dengan baik maka kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pun tidak akan maksimal (Anggadini, 2012).

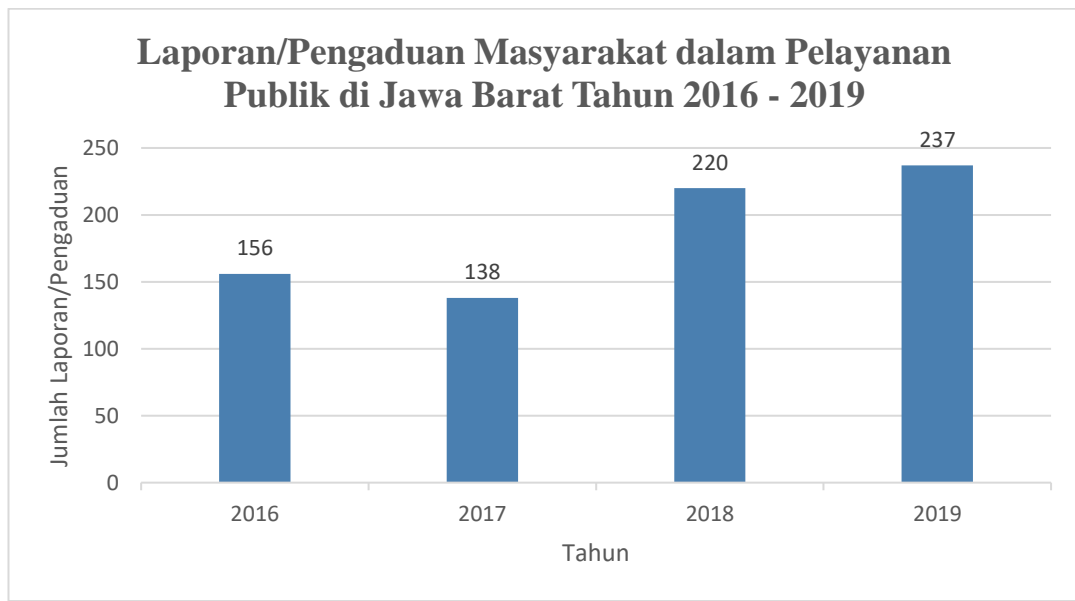
Berdasarkan kerangka ekonomi setiap pemerintah daerah diberikan hak untuk merancang kebijakannya sendiri untuk mencapai tujuan nasional yang objektif selama tujuan tersebut sejalan dengan rencana strategis pemerintah pusat. Setiap program dari pemerintah daerah berdasarkan kepada berbagai persepsi ekonomi dan politik, sehingga di dalam pelaksanaannya memiliki anggaran, program, dan kegiatan yang berbeda. Perbedaan anggaran, program dan kegiatan

yang dilaksanakan masing – masing pemerintah daerah tentunya berbeda dan akan membuat perbedaan pada kuantitas serta kualitas barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat umum. Perbedaan ini menyebabkan kondisi tingkat layanan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan tingkat layanan yang diberikan kepada masyarakat akan berbeda-beda setiap kabupaten/kota dan provinsi dari perspektif akuntansi keuangan (Ritonga I. T., 2013)

Solvabilitas layanan Pemerintah daerah adalah sebagai kapasitas Pemerintah daerah dalam menyediakan dan mempertahankan tingkat layanan yang disediakan kepada masyarakat dari perspektif informasi keuangan. Perkembangan nilai dari rasio solvabilitas layanan pemerintah daerah menunjukkan kuantitas dan kualitas pelayanan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat (Ritonga I. T., 2013). Peringkat solvabilitas layanan pemerintah daerah menunjukkan kabupaten/kota yang terbaik dalam hal menyediakan dan mempertahankan tingkat layanan untuk masyarakat, kondisi tingkat layanan kabupaten/kota, dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan layanan di masa yang akan datang.

Lembaga Ombudsman menerima laporan/pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik. Bagi masyarakat, laporan pengaduan menjadi salah satu wadah untuk mengutarakan keluhan dan saran terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Sementara itu, Bagi pemerintah daerah laporan/pengaduan menjadi hal yang penting untuk mempertahankan, menyediakan, dan meningkatkan kualitas pelayanan di masa yang akan datang. Menurut Ruswan (2020) Pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik umum terjadi ketika masyarakat selaku pengguna layanan tidak puas atas pelayanan yang diberikan, bahkan menambah

kekecewaan ketika pengaduan yang disampaikan tidak dikelola atau ditanggapi secara baik oleh petugas pengaduan. Berikut adalah grafik laporan/pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik di Jawa Barat tahun 2016- 2019:



Sumber : Ombudsman RI.

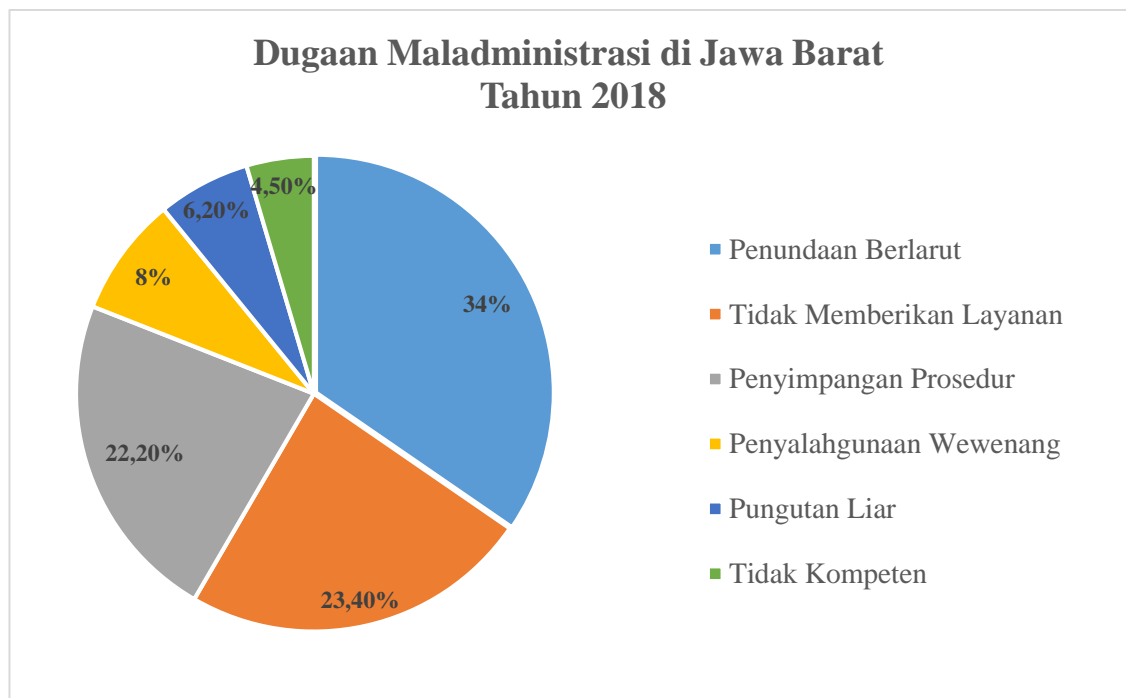
Gambar 1. 1

Laporan /Pengaduan Masyarakat dalam Pelayanan Publik di Jawa Barat Tahun 2016 – 2019

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan adanya kenaikan laporan/pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik di Jawa Barat selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, kecuali pada tahun 2017 mengalami penurunan. Data tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah di Jawa Barat dalam menyediakan dan mempertahankan layanan untuk masyarakat. Kenaikan laporan/pengaduan pelayanan publik menjadi sinyal ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Di sisi lain, penurunan laporan/pengaduan pelayanan

publik menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah.

Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu sebanyak 117 laporan atau meningkat 28% dari tahun sebelumnya. Adapun dugaan bentuk maladmistrasi adalah sebagai berikut:



Sumber : Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat.

Gambar 1. 2

Dugaan Maladministrasi di Jawa Barat Tahun 2018

Data pada gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik belum konsisten dalam menjalankan dan memenuhi komitmen layanan dalam standar pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan kepastian waktu pelayanan, mekanisme layanan yang masih berbelit serta penyalahgunaan

wewenang dalam memberikan pelayanan sehingga berujung pada potensi pungutan liar kepada masyarakat untuk memperlancar atau mempercepat layanan yang dibutuhkan. Adapun instansi terlapor yang sering diadukan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan Publik tertinggi kepada Lembaga Ombudsman adalah pemerintah daerah (Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, 2018).

Berdasarkan temuan – temuan di atas menunjukkan pemerintah daerah Jawa Barat dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat masih belum optimal. Indikator keberhasilan yang ideal dalam pelayanan yang diberikan adalah jika jumlah laporan semakin berkurang. Oleh sebab itu, perlu adanya perbaikan pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah untuk masyarakat. Hal tersebut, menjadi salah satu tantangan pemerintah untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Solvabilitas layanan dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio berdasarkan perspektif akuntansi, yaitu: rasio total aset per kapita merupakan ukuran potensi keseluruhan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah untuk memberikan layanan kepada masyarakat, rasio total ekuitas per kapita merupakan aktiva bersih yang tersedia dan dimiliki pemerintah daerah untuk memberikan layanan kepada masyarakat di masa depan, rasio total aktiva tetap per kapita merupakan akumulasi sumber daya dengan umur fungsional lebih dari dua belas bulan yang tersedia untuk digunakan dalam pelayanan publik, rasio total belanja per kapita merupakan total biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah berupa barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, dan rasio total belanja modal per kapita merupakan total pengeluaran yang untuk memperoleh aset dan/atau

menambah nilai aset berwujud yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran untuk digunakan dalam pelayanan publik.

Solvabilitas layanan setiap pemerintah daerah berbeda – beda tergantung pada kondisi daerahnya. Secara umum kabupaten dan kota memiliki luas wilayah, jumlah penduduk, latar belakang sosial, dan tingkat pendidikan yang berbeda. Hal tersebut menyebabkan kemampuan pemerintah daerah kabupaten dan kota dalam menyediakan dan mempertahankan kualitas layanan yang dibutuhkan masyarakat akan berbeda pula.

Penelitian ini menggunakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ana Tresna Purnamasari dan A.A.N.B Dwirandra (2015) dengan judul Peringkat Solvabilitas layanan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Adapun perbedaan penelitian tersebut yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu daerah wilayah Provinsi Jawa Barat sedangkan penelitian terdahulu meneliti daerah wilayah Provinsi Bali. Perbedaan lainnya yaitu pada populasi. Populasi penelitian yang penulis lakukan yaitu pada 27 Kabupaten/Kota terdiri atas 18 Kabupaten dan 9 Kota. Sedangkan peneliti terdahulu yaitu 9 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 8 Kabupaten dan 1 Kota.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERINGKAT SOLVABILITAS LAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH JAWA BARAT”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Adanya ketidakpuasan masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan pemerintah berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat yang diterima oleh Lembaga Ombudsman.
2. Ketidakkonsistenan pemerintah di Jawa Barat dalam menyediakan dan mempertahankan layanan publik, dilihat dari kenaikan dan penurunan laporan/pengaduan masyarakat yang diterima oleh lembaga Ombudsman.
3. Adanya laporan mengenai praktek maladministrasi yang diterima oleh Lembaga Ombudsman setiap tahunnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Instansi terlapor yang sering diadukan oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik tertinggi kepada Lembaga Ombudsman adalah Pemerintah daerah.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana rasio total aset per kapita, rasio total ekuitas per kapita, rasio total aktiva tetap per kapita, rasio total belanja per per kapita, dan rasio

total belanja modal per kapita pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat?

2. Bagaimana Peringkat Solvabilitas Layanan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat ?
3. Bagaimana kondisi Tingkat Solvabilitas Layanan pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui rasio total aset per kapita, rasio total ekuitas per kapita, rasio total aktiva tetap per kapita, rasio total belanja per perkapita, dan rasio total belanja modal per kapita Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui Peringkat Solvabilitas Layanan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui kondisi Tingkat Solvabilitas Layanan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada, serta

dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya mengenai solvabilitas pelayanan pemerintah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai Solvabilitas Layanan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai Solvabilitas Layanan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan informasi pendukung mengenai Solvabilitas Layanan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat.